Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 2, November 2026 ISSN: 29622743

Collaborative Governance Dalam Layanan Pendidikan Disabilitas SD Laboratorium UNG Kota Gorontalo

(Collaborative Governance in Disability Education Services at SD Laboratorium of UNG, Gorontalo City)

Fazriyanto Beraheng[1], Ismet Sulila[2], Udin Hamim[3]
[123]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
fazriberaheng@gmail.com[1], ismet.sulila@ung.ac.id[2], udin.hamim@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 9 November 2026
Revised: 23 November 2026
Accepted: 23 November 2026

Keywords:

Collaborative Governance
Inclusive education persons with disabilities
Education services
SD Laboratorium of UNG

Kata Kunci:

Collaborative Governance
Pendidikan inklusif
penyandang disabilitas
Layanan pendidikan
SD Laboratorium UNG

Abstract

This study aims to analyze the collaborative governance process in disability education services at SD Laboratorium of Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo City, focusing on Face-to-Face Dialogue, Building Trust, Commitment to the Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. This study uses a qualitative, descriptive approach. Data collection techniques are conducted through observation, interviews, and documentation. The results show that collaborative governance in disability education services has been implemented quite well. Face-to-face dialogue is carried out through regular meetings, coordination, and direct communication between the Education Office and the school. Building trust is achieved through harmonious cooperation and joint problem-solving. Commitment to the process is reflected in the active involvement of both parties in supporting inclusive education. Shared understanding is reflected in the common vision to provide fair, non-discriminatory educational services to students with disabilities. Meanwhile, intermediate outcomes indicate improvements in disability education services, marked by enhanced coordination, facility support, attention to students' needs, and continuous monitoring and evaluatio. However, strengthening coordination, technical assistance, and the provision of more ofequate facilities and infrastructure are still required to optimize inclusive education services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam layanan pendidikan disabilitas di SD Laboratorium UNG Kota Gorontalo yang berfokus pada Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen terhadap proses, Pemahaman Bersama dan Hasil Antara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam layanan pendidikan disabilitas telah berjalan cukup baik. Dialog tatap muka dilakukan melalui pertemuan rutin, koordinasi, dan komunikasi langsung antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah. Membangun kepercayaan melalui kerja sama yang harmonis dan penyelesaian masalah secara bersama. Komitmen terhadap proses terlihat dari keterlibatan aktif kedua pihak dalam mendukung pendidikan inklusif. Pemahaman bersama tercermin pada kesamaan visi untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi peserta didik disabilitas. Sementara itu, hasil antara menunjukkan adanya perkembangan layanan pendidikan disabilitas, ditandai dengan peningkatan koordinasi, dukungan fasilitas, perhatian terhadap kebutuhan peserta didik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan koordinasi, pendampingan teknis, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna mengoptimalkan layanan pendidikan inklusif.

Corresponding Author:

Fazriyanto Beraheng
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
fazriberaheng@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki nilai dan kedudukan yang setara sebagai manusia, namun tidak semua mendapatkan perlakuan yang setara dalam kehidupan sosial. Berbagai persoalan kemanusiaan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat modern. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketidaksetaraan sosial, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang, jasa, maupun pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat memperoleh akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat masih sering memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis penyandang disabilitas sehingga sebagian dari mereka mengalami penurunan rasa percaya diri. Padahal, sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengakuan, diterima oleh lingkungan sosial, serta terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik perlu diperlakukan secara setara dengan individu lainnya tanpa adanya diskriminasi. Penyandang disabilitas fisik merupakan individu yang mengalami keterbatasan pada anggota tubuh tertentu sehingga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan sebagian penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri akibat adanya pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, pada dasarnya mereka tetap memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan secara mandiri. Kurangnya dukungan dan motivasi dari keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan diri penyandang disabilitas dalam mengembangkan kemandiriannya (Surlinni, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal (1) dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas, Kota Gorontalo merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Secara regulasi, sebagai langkah pertama untuk memenuhi layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, perlu adanya regulasi daerah (PERDA) yang memastikan pemenuhan hak asasi mereka. Pemerintah Kota Gorontalo menerbitkan PERDA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. BAB V Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dari jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Melalui kebijakan pendidikan daerah, pemerintah Kota Gorontalo mendorong sekolah-sekolah untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, salah satunya yaitu Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo (SD Laboratorium UNG).

SD Laboratorium UNG merupakan salah satu sekolah di Kota Gorontalo yang menerapkan pendidikan inklusif dengan menerima dan melayani peserta didik penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran. Sebagai sekolah yang berkomitmen pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan, SD Laboratorium UNG berupaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik. Penerapan pendidikan inklusif di sekolah ini tidak hanya diwujudkan melalui penyesuaian strategi pembelajaran, tetapi juga melalui penyediaan layanan pendukung yang bertujuan mengoptimalkan perkembangan akademik dan sosial peserta didik. Kehadiran SD Laboratorium UNG sebagai sekolah inklusif mencerminkan upaya nyata dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif

di Kota Gorontalo, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

Tabel 1. Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas Tahun 2023/2024 - 2025/2026

No	Jenis Diagnosa	Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas SD Laboratorium UNG		
		Tahun Ajaran		
		2023/2024	2024/2025	2025/2026
1	Proses Assessment	3 Siswa	10 Siswa	15 Siswa
2	ASD	7 Siswa	7 Siswa	7 Siswa
3	ADHD	2 Siswa	2 Siswa	2 Siswa
4	GDD	2 Siswa	2 Siswa	2 Siswa
5	Late Bloomer	1 Siswa	1 Siswa	1 Siswa
6	ODD	1 Siswa	1 Siswa	1 Siswa
7	Self Esteem	1 Siswa	1 Siswa	1 Siswa
8	Kesulitan Belajar	1 Siswa	1 Siswa	-
9	CP	1 Siswa	1 Siswa	-
10	ADD	2 Siswa	3 Siswa	-
11	Speech Delay	-	1 Siswa	-
Total		**21 Siswa**	**30 Siswa**	**29 Siswa**
		80 Siswa		

Sumber: SD Laboratorium UNG

Berdasarkan data diagnosis penyandang disabilitas di SD Laboratorium UNG, jumlah peserta didik yang teridentifikasi mengalami fluktuasi selama tiga tahun ajaran terakhir. Pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sebanyak 21 peserta didik, kemudian meningkat menjadi 30 peserta didik pada tahun ajaran 2024/2025. Selanjutnya, pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah tersebut sedikit menurun menjadi 29 peserta didik. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, jumlah peserta didik yang teridentifikasi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun ajaran 2023/2024.

Dari hasil diagnosis peserta didik penyandang disabilitas di SD Laboratorium UNG Tahun 2023/2024 – 2025/2026, diketahui bahwa sebagian besar peserta didik masih berada pada tahap proses *asesment*. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan inklusif di SD Laboratorium UNG memerlukan dukungan kolaboratif lintas pihak, khususnya dalam percepatan asesmen dan tindak lanjut layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain siswa yang masih dalam proses asesmen, terdapat beberapa peserta didik yang telah memiliki hasil diagnosis tertentu, antara lain *Autism Spectrum Disorder* (ASD), *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), *Global Developmental Delay* (GDD), *Oppositional Defiant Disorder* (ODD), *Late Bloomer*, dan *self-esteem* rendah. Siswa dengan ASD umumnya mengalami hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosial serta menunjukkan pola perilaku yang khas, sehingga membutuhkan strategi pembelajaran yang terstruktur dan dukungan individual. Peserta didik dengan ADHD mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian dan mengendalikan perilaku, yang berdampak pada proses belajar di kelas dan memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel.

Sementara itu, siswa dengan GDD menunjukkan keterlambatan perkembangan pada beberapa aspek secara bersamaan, seperti bahasa, motorik, dan kognitif, sehingga membutuhkan pendampingan dan layanan pendidikan yang komprehensif. ODD ditandai dengan perilaku menentang dan kesulitan dalam mematuhi aturan, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan perilaku yang konsisten dan kolaboratif. *Late Bloomer* menggambarkan kondisi siswa yang berkembang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya, namun masih memiliki potensi untuk berkembang secara optimal dengan dukungan yang tepat. *Cerebral Palsy* (CP) merupakan gangguan pada fungsi gerak dan koordinasi tubuh akibat adanya gangguan pada perkembangan otak. Peserta didik dengan CP umumnya mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan, sehingga membutuhkan dukungan dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam memahami atau menguasai materi pelajaran tertentu. Meskipun memiliki kemampuan intelektual yang normal, mereka memerlukan metode pembelajaran yang lebih sesuai agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. *Speech delay* adalah keterlambatan perkembangan kemampuan berbicara dibandingkan dengan anak seusianya. Peserta didik dengan kondisi ini biasanya mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata atau menyampaikan keinginan dan pikirannya secara verbal. *Attention Deficit Disorder* (ADD) merupakan gangguan yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian dan mempertahankan konsentrasi. Peserta didik dengan ADD sering kali mudah terdistraksi, kurang fokus saat belajar, dan membutuhkan pendampingan agar dapat

mengikuti pembelajaran secara optimal. Adapun *self-esteem* berkaitan dengan rendahnya kepercayaan diri siswa yang dapat memengaruhi motivasi belajar dan interaksi sosial di lingkungan sekolah.

Selain itu, salah satu permasalahan yang masih dihadapi dalam layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas. Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran yang inklusif karena peserta didik disabilitas memerlukan fasilitas yang dapat mendukung kenyamanan, aksesibilitas, serta perkembangan kemampuan belajar mereka. Ketersediaan fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, hal tersebut membutuhkan partisipasi dari sektor pemerintah dan sekolah dalam kerangka kolaboratif atau *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah salah satu strategi baru yang ada dalam pemerintahan saat ini. Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam Qalby (2018), *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Kerja sama tersebut melibatkan berbagai pihak, yaitu Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan pihak SD Laboratorium UNG.

Dalam penerapan kolaborasi terhadap layanan pendidikan penyandang disabilitas pada SD Laboratorium UNG, masih ada masalah dan hambatan dalam pendidikan terhadap penyandang disabilitas serta tidak jarang pula Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan pihak SD Laboratorium UNG masih abai dalam proses kolaboratif tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari observasi awal sebelumnya. Peneliti menemukan masalah dalam proses kolaborasinya. SD Laboratorium UNG telah memiliki fasilitas berupa ruang sensorik yang digunakan untuk membantu perkembangan fungsi sensorik dan motorik peserta didik disabilitas. Namun, keberadaan fasilitas tersebut dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi standar sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, seperti jalur khusus pengguna kursi roda, toilet aksesibel, pegangan tangan (*handrail*), media pembelajaran khusus, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang aktivitas peserta didik disabilitas di lingkungan sekolah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya intensitas koordinasi antara kedua pihak yang berdampak pada proses pemenuhan kebutuhan peserta didik disabilitas serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan inklusif. Kurangnya koordinasi yang dilakukan secara rutin menyebabkan proses komunikasi dan penyampaian kebutuhan sekolah menjadi kurang optimal sehingga dapat memengaruhi efektivitas kerja sama dalam mendukung layanan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas.

Dalam kerangka *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, terdapat 4 dimensi yakni: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional serta proses kolaborasi. Pada proses kolaborasi, menekankan pada pentingnya dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses kolaboratif (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), serta hasil antara *(intermediate outcomes)* dari proses kolaborasi. Namun, dalam praktiknya, proses dialog yang belum berlangsung secara intens dan berkelanjutan menghambat terbentuknya kepercayaan dan kesepahaman antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan komitmen bersama dalam penyelarasan kebijakan, dukungan sumber daya, serta pendampingan teknis pendidikan inklusif belum terbangun secara optimal. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan layanan akademik dan nonakademik bagi peserta didik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penguatan proses kolaborasi berdasarkan tahapan dan prinsip *collaborative governance* Ansell dan Gash menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan layanan pendidikan disabilitas yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sehubungan dengan hal tersebut, jelas bahwa *stakeholder* tidak bisa hanya menitikberatkan pada kemampuan dari internal saja dalam menerapkan kebijakan dan program yang memajukan masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif atau *collaborative governance* dalam memaksimalkan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana proses kolaborasi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG. Karena itu, peneliti memilih judul penelitian: "*Collaborative governance* Dalam Layanan Pendidikan Disabilitas SD Laboratorium UNG Kota Gorontalo".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam buku Dr. J. R. Raco, pendekatan kualitatif bertujuan memahami inti suatu permasalahan melalui proses penyelidikan yang mendalam. Untuk menemukan inti tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada partisipan, kemudian menarik kesimpulan dari jawaban yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih agar peneliti

dapat memahami secara menyeluruh proses pemberdayaan penyandang disabilitas serta mengidentifikasi inovasi yang dijalankan oleh pemangku kepentingan terkaitmelalui observasi, wawancara, dan dokumentasi..

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya yang memahami pelaksanaan layanan pendidikan disabilitas. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan objek penelitian, melakukan pengamatan, wawancara, serta kegiatan lain yang dianggap dapat memperoleh data yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menggali informasi secara langsung serta mengidentifikasi data dan informasi secara lebih akurat. Dalam Penelitian ini bertujuan memahami Kolaborasi *Stakeholder*s terhadap subjek Penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara dan pengamatan terhadap Dinas Pendidikan dan SD Laboratorium, dengan fokus pada tata kelola kolaboratif dalam upaya memberdayakan orang dengan disabilitas di Kota Gorontalo dan data Sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber referensi seperti buku, laporan, peraturan serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan program pemerintah dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Gorontalo.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Proses pencatatan sangat penting, termasuk catatan lapangan yang mencatat hasil wawancara selama observasi dengan menggunakan bahasa yang objektif. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku catatan dan perangkat pendukung lainnya. Abdillah et al. (2021) mengemukakan beberapa teknik, antara lain: observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Peneliti sebagai human instrument memiliki peran dalam menetapkan fokus penelitian, menentukan informan, mengumpulkan dan menilai data, melakukan analisis serta interpretasi, hingga menarik kesimpulan dari hasil penelitian (Sinaga & Sinaga, 2025). Pada umumnya, informan dalam penelitian kualitatif terdiri atas dua jenis, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam terkait permasalahan yang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah individu yang tidak termasuk informan kunci namun memberikan informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas serta data yang kredibel. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengabsahan data melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan pada waktu yang berbeda. Untuk keperluan triangulasi, dilakukan tiga cara yaitu triangulasi sumber,tiangulasi teknik, triangulasi waktu (Sugiyono, 2013).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Abdussamad, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo, layanan pendidikan disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan dasar. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis proses collaborative governance berdasarkan Ansell dan Gash (2008) yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara.

3.1 Dialog Tatap Muka *(Face-to-Face Dialogue)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah dilaksanakan melalui pertemuan rutin, koordinasi, serta komunikasi langsung dalam membahas kebutuhan layanan pendidikan disabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek *face-to-face dialogue* dalam *collaborative governance* telah berjalan dengan cukup baik karena memberikan ruang bagi kedua pihak untuk bertukar informasi, menyampaikan kebutuhan, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi. Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka merupakan elemen utama dalam proses kolaborasi karena menjadi sarana membangun komunikasi yang efektif dan menciptakan kesepahaman antar pemangku kepentingan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayatullah et al., 2023) yang menyatakan bahwa dialog tatap muka berperan penting dalam mendukung terciptanya tujuan

dan manfaat bersama dalam kolaborasi. Oleh karena itu, pertemuan yang dilakukan secara berkala telah membantu memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG dalam mendukung layanan pendidikan inklusif. Namun demikian, intensitas dialog terkait isu pendidikan disabilitas perlu terus ditingkatkan agar proses pemenuhan kebutuhan peserta didik disabilitas dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

3.2 Membangun Kepercayaan *(Trust Building)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah terbangun melalui hubungan kerja sama yang harmonis, komunikasi yang baik, serta pembagian peran yang saling melengkapi dalam mendukung layanan pendidikan disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek *trust building* dalam *collaborative governance* telah berjalan dengan cukup baik. Menurut De Seve dalam Makuta et al. (2025), kepercayaan dibangun melalui hubungan profesional dan sosial yang terjalin antaraktor. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan menjadi dasar penting dalam memperkuat kolaborasi antara kedua pihak untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan fasilitas agar kepercayaan yang telah terbangun dapat semakin kuat dan berkelanjutan.

3.3 Komitmen terhadap Proses *(Commitment to Process)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG memiliki komitmen yang cukup baik dalam mendukung layanan pendidikan disabilitas. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif kedua pihak melalui koordinasi, pemantauan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Menurut Islamy dan Andriani (2022) bahwa dalam prosesnya, setiap aktor menyampaikan pandangan dan pendapat yang dianggap dapat mendukung kepentingan bersama. Perbedaan pandangan maupun pendapat yang muncul selama diskusi merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun, seluruh pihak memahami bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian yang wajar dari proses diskusi dan dapat menjadi sarana untuk menghasilkan kesepakatan yang disetujui bersamaTemuan tersebut sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa komitmen terhadap proses merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Selain itu, penelitian Sinaga (2021) juga menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan para aktor selama proses berlangsung. Meskipun demikian, komitmen tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan pendampingan teknis, keberlanjutan program, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif..

3.4 Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG memiliki kesamaan visi dalam memberikan layanan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi bagi peserta didik disabilitas. Kesamaan tujuan tersebut menunjukkan bahwa aspek *shared understanding* telah terbentuk dengan baik dalam proses kolaborasi. Menurut Winarsih (2019), pemahaman bersama mencakup kesamaan pandangan terhadap tujuan kolektif, permasalahan yang dihadapi, serta nilai-nilai yang menjadi dasar kolaborasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya kesamaan visi dan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak mampu memperkuat koordinasi dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan inklusif secara lebih efektif.

3.5 Hasil Antara *(Intermediate Outcomes)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah menghasilkan perkembangan positif dalam layanan pendidikan disabilitas, seperti tersedianya ruang sensorik, meningkatnya perhatian terhadap kebutuhan peserta didik disabilitas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek *intermediate outcomes* dalam *collaborative governance* telah tercapai melalui berbagai capaian awal yang mendukung peningkatan layanan pendidikan inklusif. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Irmawati (2023) yang menyatakan bahwa hasil antara berperan dalam memperkuat kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tulie et al. (2024), bahwa Keberlanjutan kolaborasi akan lebih mudah dicapai apabila para pihak telah merasakan manfaat dan hasil dari proses kerja sama yang berlangsung, meskipun masih berada pada tahap awal kolaborasi. Hasil-hasil sementara yang diperoleh dapat meningkatkan kepercayaan serta motivasi para aktor untuk tetap berpartisipasi dan mendukung keberlangsungan kolaborasi Selain itu, Ainscow dalam Marsidi (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas yang perlu ditingkatkan agar tujuan kolaborasi dapat tercapai secara optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Collaborative Governance dalam Layanan Pendidikan Disabilitas di SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo Kota Gorontalo*, dapat disimpulkan bahwa:

1) Dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah terlaksana melalui koordinasi, konsultasi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Komunikasi yang terjalin memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan kebutuhan, kendala, serta solusi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2) Membangun kepercayaan (*trust building*) antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah berjalan melalui hubungan kerja sama yang didasarkan pada keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling mendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kepercayaan yang terbentuk menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
3) Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) ditunjukkan melalui keterlibatan aktif Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung layanan pendidikan disabilitas. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya pembinaan, koordinasi, dan penyediaan layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
4) Pemahaman bersama (*shared understanding*) telah terbentuk melalui kesamaan visi dan tujuan antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
5) Hasil antara (*intermediate outcomes*) dari proses kolaborasi menunjukkan adanya capaian positif berupa peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, tersedianya fasilitas pendukung layanan pendidikan disabilitas, serta meningkatnya perhatian terhadap kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas di SD Laboratorium UNG Kota Gorontalo.

Secara keseluruhan, collaborative governance antara Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan SD Laboratorium UNG telah berjalan cukup baik dalam mendukung layanan pendidikan disabilitas. Kelima indikator collaborative governance menunjukkan adanya proses kolaborasi yang positif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, meskipun masih diperlukan penguatan dukungan sumber daya dan fasilitas guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo disarankan untuk meningkatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

SD Laboratorium Universitas Negeri Gorontalo disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait pendidikan inklusif serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas.

Kolaborasi yang telah terjalin perlu diperkuat dengan melibatkan orang tua, perguruan tinggi, komunitas disabilitas, dan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian collaborative governance dalam layanan pendidikan inklusif dengan melibatkan lebih banyak aktor dan lokasi penelitian yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang tata kelola kolaboratif pada layanan pendidikan disabilitas.

REFERENSI

Abdillah, L. A., Hs, S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnasari, S. D., Wulandari, Prasetyo, A. H., Sinambela, S., Mansur, Aulia, T. Z., Hamzah, A., Firmansyah, H., Andari, S., Rismadi, B., Purba, S., Gazi, & Sina, I. (2021). *Metodologi Penelitian & Analisis Data Comprehensive* (S. S. Posangi, I. Kusumawati, & Zaharah (Eds.)). Penerbit Insania.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Satu). Cv. Syakir Media Press.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, *18*(4), 543-571.

Hidayatullah, M. A., Purnaweni, H., & Yuwono, T. (2023). Proses collaborative governance dalam penanganan banjir di Kota Semarang City. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *8*(4), 276-285.

Irmawati, I. (2023). *Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Islamy, L. O. S., & Andriani, R. (2022). *Proses Collaborative Governance Dalam Penegelolaan Dana Desa*. *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(April), 1–23.

Makuta, S., Nani, Y. N., & Tohopi, R. (2025). A Collaborative Governance in the Implementation of the Family Hope Program in Tilamuta District, Boalemo Regency. *PROVIDER Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 52-63.

Marsidi, A. (2021). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, *5*(3), 1–5.

Qalby, A. N. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sinaga, A., & Sinaga, R. P. K. (2025). Dampak Ketidakstabilan Harga Kelapa Sawit Bagi Kesejahteraan Petani Di Desa Nagori Bayu Bagasan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *4*(1), 17–24. https://Doi.Org/10.55123/Sosmaniora.V4i1.4762

Sinaga, R. M. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th Ed.). Alfabeta.

Surlinni. (2021). *Upaya Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Motivasi Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (Brspdf) Wirajaya Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tulie, E., Aneta, A., Aneta, Y., & Sulila, I. (2024, November). Institutional Revitalization: Synchronizing Local Legislative Programs with Local Government Work Plans in Gorontalo, Indonesia. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 351-378).

Winarsih, D. (2019). Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Indonesia : Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *20*(2).